

**FUNGSI BUMDes TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi di Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh
RETHA NABILA YUSTIA
NPM. 1631040031

Jurusan : Pemikiran Politik Islam




**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2020M**

FUNGSI BUMDes TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi di Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana SI
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama



Oleh
RETHA NABILA YUSTIA
NPM. 1631040031
Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si
Pembimbing II : Drs. Agustamsyah, M.I.P

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M

ABSTRAK

FUNGSI BUMDes TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Di Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus)

Oleh

RETHA NABILA YUSTIA

BUMDes Amanah pada hakikatnya belum berjalan secara optimal, pada realita atau kenyataannya masyarakat Desa Sinar Betung masih minim pendapatan dan kesejahteraan. Sehingga masyarakat membutuhkan hadirnya BUMDes yang dijadikan sebagai wadah untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan serta membantu aparat pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian Kualitatif dengan sifat penelitian yaitu Deskriptif Analitik. Sifat penelitian tersebut merupakan suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan dianalisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan. Jenis penelitian pada skripsi ini yaitu Penelitian Lapangan atau *field research*. Penelitian ini dilakukan di Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, tepatnya di Kantor BUMDes Amanah Desa Sinar Betung. Pada penelitian ini mengambil sampel 10 orang dengan metode pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Adapun metode pengumpulan datanya yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Pengolahan Data. Analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, display data, dan teknik verifikasi (kesimpulan). Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa fungsi BUMDes terhadap pemberdayaan masyarakat kurang optimal dalam menjalankan tujuan pemberdayaan untuk memperbaiki kelembagaan usaha, pendapatan desa dan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes Amanah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang optimal, hal ini dikarenakan BUMDes belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang mayoritas petani serta kurangnya kordinasi antara BUMDes dengan aparatur desa dan masyarakat.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Retha Nabila Yustia
NPM : 1631040031
Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

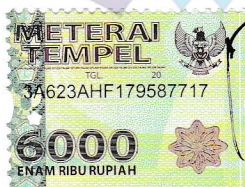
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ***"Fungsi BUMDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus)"*** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 13 Maret 2020

Penulis,



Retha Nabila Yustia
Retha Nabila Yustia
NPM. 1631040031



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Suratmin sukarama 1 Bandar Lampung 35131 telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI : FUNGSI BUMDes TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus)

NAMA : RETHA NABILA YUSTIA

NPM : 1631040031

JURUSAN : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

FAKULTAS : USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Ali Abdul Wahid, M.Si
NIP. 197503172003121003

Pembimbing II

Drs. Agustamsyah, M.I.P
NIP. 196801041994031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP. 197801302011012004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Suratmin sukarama 1 Bandar Lampung 35131 telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"FUNGSI BUMDes TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus)"** Disusun oleh, **RETHA NABILA YUSTIA, NPM. 1631040031**, Program Studi : **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**, telah diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu/ 6 Mei 2020.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Abdul Malik Ghozali, M.A.

Sekretaris Sidang : Eska Prawisudawati Ulpa, M.Si.

Penguji I : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si.

Penguji II : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si.

Penguji III : Drs. Agustamsyah, M.I.P.

DEKAN

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. Afif Anshori, M.Ag
NIP. 196003131989051004

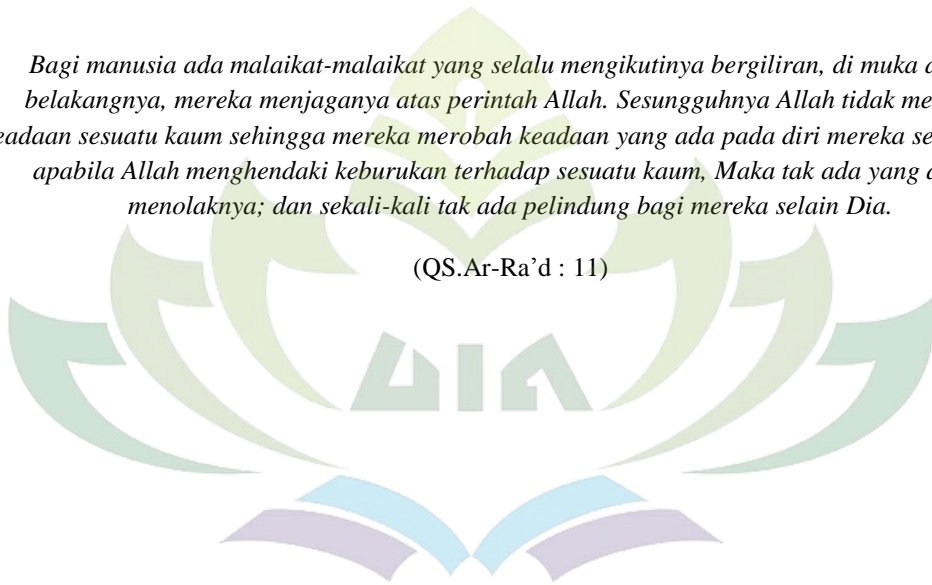
MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا
بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ

دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

(QS.Ar-Ra'd : 11)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan penulis persembahkan sebagai cinta kasih sayang serta hormat untuk orang terdekat yang telah berjasa dan memberikan motivasi serta dukungan selama penulis menuntut ilmu :

1. Terima kasih teruntuk kedua orang tua ku Ayah Usman, S.E dan Mamah Endang Sulistyawati, S.Pd orang yang paling terhebat, teristimewa dan berjasa dikehidupanku, orang yang selalu tidak pantang menyerah dan memberikan doa, dukungan, bantuan, kasih sayang, selalu menyemangati, pengorbanan serta selalu memberikan inspirasi dan motivasi disetiap langkah perjalanan penulis dalam menuntut ilmu dari taman kanak-kanak hinggan perguruan tinggi.
2. Terima kasih kepada adikku yang tercinta Khaysar Gentza Naufal Athaya yang selama ini selalu menghiburku disaat lelah, menemaniku, memotivasiku untuk segera menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
3. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar H.M. Idris (alm.) dan keluarga besar Soeparno H.D.O (alm.) yang telah mendukungku dalam menyelesaikan studiku, dan terkhusus kepada eyang putri Sri Sulastri yang telah memberikan banyak motivasi untuk menyelesaikan studi ku.



RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi bernama lengkap Retha Nabila Yustia merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Usman, S.E dan Ibu Endang Sulistyawati, S.Pd. Lahir di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 16 Juni 1998.

Pendidikan yang penulis tempuh di mulai Pada Tahun 2004 penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Riana Al Amin Kota Bandar Lampung. Lanjut di Tahun 2005 penulis mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri 1 Rawa Laut lulus di tahun 2010. Lanjut penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 5 Bandar Lampung lulus pada tahun 2013. Selanjutnya di tahun 2013 mengenyam pendidikan menengah atas di SMA Negeri 12 Bandar Lampung lulus pada tahun 2016.

Syukur alhamdulillah kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016 tercatat sebagai salah satu mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, jurusan Pemikiran Politik Islam dan terselesaikan pada tahun 2020.

Bandar Lampung, 13 Maret 2020

Penulis



Retha Nabila Yustia

1631040031

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang maha esa atas berkat limpahannya serta rahmatnya dan karunianya, penyusunan skripsi dengan judul **“Fungsi BUMDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar (S1) Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat bantuan dari pihak lain berupa bimbingan, petunjuk, saran, kritik, informasi, dan pengarahan oleh penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan berterima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Bapak Dr. H. M. Afif Anshori, M.A selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Idrus Ruslan, M.Ag selaku pembimbing akademik yang memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung,
5. Bapak Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. H. Agustamsyah, M.I.P pembimbing II yang telah memberikan arahan, ilmu pengetahuannya, saran terhadap skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama terkhususnya di jurusan Pemikiran Politik Islam.
7. Seluruh Staff dan kepegawaian dari tingkat dekanat dan sampai tingkat paling bawah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran skripsi ini.

8. Keluarga yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
9. Semua pengurus BUMDes dan aparat pemerintah Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus yang telah memberikan data, informasi, bantuan, arahan, bimbingan, pengetahuan, pengalaman, saran, serta dukungan terhadap skripsi ini.
10. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan perpustakaan Daerah Lampung yang telah berkenankan penulis untuk meminjam literature penulisan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku tercinta Iffah Dzakiyah, Indah Ayu Lestari, dan Ramco Yudi Gustiarto yang telah mendukung, memberikan motivasi, dan menyemangati penulis memberikan energi positif untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada sepupuku tercinta Putri Safitri Darmayanti yang selalu menemani dengan sabar memberikan dukungan dalam perjalanan penulisan skripsiku, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsiku.
13. Terima kasih kepada kakak tingkatku Riska Wahyuni yang telah memberikan bantuan, ilmu dan memotivasiku dari awal pembuatan proposal skripsi hingga skripsi.
14. Terima kasih kepada sahabat SMA ku hingga sekarang Nabella Tamara, Rahma Mauliyani, Nada Indriyani, dan Ervitia Arum Tantri yang telah mendukung, memberikan keceriaan, suasana yang berbeda, memotivasi, dan saling berbagi ilmu.
15. Sahabat perjuangan Pemikiran Politik Islam A dan seluruh angkatan 2016 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya dalam penulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang didapat bersama-sama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah dunia akhirat.
16. Teman-teman KKN 102 yang telah memberikan support dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 13 Maret 2020

Penulis



Retha Nabila Yustia

1631040031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian	10
H. Metode Penelitian	11

BAB II BUMDes DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Badan Usaha Milik Desa	20
1. Pengertian BUMDes	20
2. Tujuan dan Fungsi Pendirian BUMDes	22

3. Landasan Hukum BUMDes.....	24
4. Prinsip-Prinsip BUMDes.....	25
5. Pengurus dan Pengelolaan BUMDes.....	28
6. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes.....	33
B. Pemberdayaan Masyarakat	35
1. Pemberdayaan Masyarakat dan Konsep Pemberdayaan.....	35
2. Model Pemberdayaan Masyarakat.....	38
3. Tujuan Pemberdayaan.....	39
4. Proses Pemberdayaan Masyarakat.....	40
5. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	42
6. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	43
7. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat	44
C. Kesejahteraan Masyarakat	46
1. Kesejahteraan Secara Umum.....	46
2. Konsep Kesejahteraan	47
3. Tujuan Kesejahteraan	50
4. Fungsi Kesejahteraan	50
5. Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	51
D. Tinjauan Pustaka.....	54
E. Kerangka Berfikir	57

BAB III FUNGSI BUMDes TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Desa Sinar Betung.....	60
1. Sejarah Umum Desa Sinar Betung	60
2. Sejarah Pemerintahan Desa Sinar Betung.....	61
3. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Sinar Betung	62
4. Struktur Organisasi Desa Sinar Betung	69

5. Kondisi Sosial Ekonomi, Agama dan Budaya	69
6. Sarana dan Prasarana Desa Sinar Betung	73
B. Gambaran Umum BUMDes Amanah Desa Sinar Betung.....	74
1. Organisasi	74
2. Tujuan Pembentukan BUMDes Amanah.....	75
3. Struktur Kepengurusan BUMDes Amanah	76
4. Visi dan Misi BUMDes Amanah.....	76
C. Unit Kegiatan Usaha BUMDes Amanah	77
D. Peran BUMDes Terhadap Masyarakat Desa Sinar Betung	79
BAB IV FUNGSI BUMDes TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
A. Fungsi BUMDes Amanah Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.....	81
B. Implementasi Kegiatan Usaha BUMDes Amanah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sinar Betung.....	86
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Rekomendasi.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul pada skripsi ini adalah sebuah karya ilmiah yang sangat penting, karena dapat memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul skripsi ini adalah “Fungsi BUMDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat”. Mempertegas istilah-istilah yang terdapat pada tersebut secara terperinci agar mudah dimengerti dan dipahami, serta untuk memberikan penjelasan dalam memahami maksud judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu menguraikan definisi istilah yang terdapat pada judul tersebut. Hal ini dengan maksud untuk mudah memahami dan juga untuk mengarahkan pada maksud penelitian yang diinginkan oleh penulis. Berikut ini istilah-istilah yang terdapat dalam judul, akan diuraikan sebagai berikut :

Fungsi BUMDes merupakan sesuatu yang berupa tugas atau perintah yang diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan badan usaha milik desa, dimana fungsi BUMDes untuk meningkatkan sumber pendapatan desa. BUMDes hadir bukan untuk berorientasi pada keuntungan tetapi lebih mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu fungsi BUMDes juga untuk mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi yang ada di Desa tersebut.¹

¹ www.folderdesa.com (diakses pada tanggal 4 November 2019, Pukul 08.35 WIB).

Badan Usaha Milik Desa atau bisa disebut BUMDes merupakan suatu badan perekonomian desa yang memiliki badan hukum, dimana dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintahan Desa, dikendalikan secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya yang sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDes merupakan lembaga usaha yang pada bidang pengelolaan aset-aset serta sumber daya pendapatan desa dengan rangka pemberdayaan masyarakat.²

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Fahrudin, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan untuk menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hidup lebih mandiri dan dapat berpengaruh untuk orang lain, masyarakat, dan lingkungan.³

²Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Badan Usaha Milik Desa*, Pasal 78 ayat (1).

³Adiatma Nugraha, Kismaranti, *Evaluasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Rejo Mulyo Desa Gogik Kecamatan Unggaran Barat Kabupaten Semarang*, (Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol.1, No. 1, 2019) (diakses 19 September 2019 Pukul 02.28 WIB). h. 47.

Berdasarkan penegasan judul diatas, maka penulis memasukkan bahwa judul Fungsi BUMDes adalah untuk melihat bagaimana BUMDes berfungsi sebagai badan usaha yang dapat memberdayakan masyarakat serta meningkatkan perekonomian desa. Penelitian ini juga mengkaji mengenai bagaimana fungsi dan kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat di desa tersebut, serta upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal yang ada di wilayah tersebut, melalui program keberlanjutan sehingga dapat menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Maka dalam hal ini penulis meneliti BUMDes yang ada di Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan peneliti memilih judul skripsi Fungsi BUMDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Dalam penelitian tentunya memiliki berbagai alasan yang sangat memotivasi terhadap penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan sebuah wadah pemberdayaan masyarakat di Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, didirikan sesuai dengan kebutuhan desa, tetapi tidak sesuai dengan potensi desa tersebut. Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan

pendapatan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu dengan adanya peluang kepada masyarakat untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya.

2. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi atau proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk mengubah pola perilaku, memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan disini juga melibatkan partisipasi masyarakat, karena masyarakat disini tidak hanya dijadikan objek pembangunan tetapi dapat mengembangkan potensi yang diberikan fasilitas oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sampai masyarakat tersebut bisa mandiri.
3. Pokok bahasan dalam skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, yakni jurusan Pemikiran Politik Islam. Data-data serta literatur yang diperlukan pada penyusunan skripsi ini cukup tersedia, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Pemerintah diberikan amanat guna untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut asas desentralisasi, hal ini tercantum pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Didesa telah ada seperangkat lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar inisiatif masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Pemerintah sebagai Stakeholder yang merupakan bagian terpenting dari sebuah

organisasi yang memiliki peran untuk membantu mengembangkan potensi yang terdapat pada Desa. melihat kenyataannya pemerintah harus mengeluarkan kebijakan mengenai pentingnya pembentukan lembaga masyarakat yang modern dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah memberikan kebijakan atau wewenang kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di desa tersebut. Pemerintah selalu mengupayakan untuk memajukan desa agar tidak selalu tertinggal dan direndahkan sehingga tidak hanya dijadikan objek pembangunan, namun mereka juga dapat berpartisipasi dalam hal pembangunan. Pada Undang-Undang Nomor 6 juga menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat, dimana pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui pendekatan kebijakan, program, kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.⁵ Dalam hal ini, maka pemerintah menerapkan pendekatan yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian

⁴Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h.3

⁵Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : Refika Aditama, Cetakan ke- lima, 2014), h.68

masyarakat desa dengan upaya membangun wadah masyarakat yaitu Badan Usaha Miliki Desa atau dikenal dengan BUMDes.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan didirikan BUMDes yaitu upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes yang diatur dalam Permendagri yaitu bentuk jasa, penyaluran Sembilan Bahan Pokok, perdagangan hasil pertanian, industri kecil rumah tangga yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi desa. Pendirian BUMDes harus disertai upaya penguatan kapasitas yang didukung oleh kebijakan daerah yang membantu melindungi ancaman dari persaingan pasar. BUMDes pertama kali muncul melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa kemudian di jelaskan dan dipertegas pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat 1 disebutkan bahwa desa mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. BUMDes juga didirikan berdasarkan inisiatif masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif,

transparansi, emansipatif, akuntabel, serta berkelanjutan dengan mekanisme member base dan self help.⁶

BUMDes Amanah dalam hal ini belum menjalankan prinsip-prinsip yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat 1. Hal ini terjadi karena pemahaman perangkat desa yang masih sangat kurang. Kondisi ini terjadi karena kepala desa dan perangkat desa hanya sebagai pelaksana atau kepanjangan tangan dari struktur pemerintah daerah. Beberapa kabupaten telah banyak yang mendirikan BUMDes, ada yang secara mandiri dan ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan memberikan modal melalui APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDes.⁷

Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung yakni tepatnya di Desa Sinar Betung Kecamatan Talang Padang telah mendirikan BUMDes yaitu BUMDes Amanah. Kecamatan Talang Padang memiliki 20 Desa atau Kelurahan yang sebagian daerah memiliki bermacam potensi sumber daya alam yang berada di wilayah berbagai macam potensi sumber daya yang sampai saat ini masih belum dikelola dengan maksimal seperti sumber daya alam berupa pertanian dan perkebunan. Sehingga dalam hal ini pemerintah harus bekerja sama dengan wadah masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada yaitu melalui BUMDes. Desa Sinar Betung memiliki potensi yaitu pada bidang pertanian, perkebunan, dan perdagangan dengan

⁶David Wijaya, BUM DES, (Yogyakarta : Grava Media, Cetakan ke- satu, 2018), h.92

⁷Departemen Pendidikan Nasional, Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, (Universitas Brawijaya : Pusat Kajian Dinamika Sistem Pemerintahan (PKDSP), 2007), h.7

potensi sumber daya alam yang sangat baik. Desa Sinar Betung memiliki 1108 jiwa yang terdiri atas 550 jiwa laki-laki dan 558 jiwa perempuan, serta memiliki luas wilayah 146 Ha. BUMDes Amanah berdiri sejak 27 Desember 2017 ditetapkan melalui peraturan desa.

Adapun jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes Amanah yaitu dalam bentuk jasa. Usaha dalam bentuk jasa tersebut yaitu dibukanya usaha Foto Copy, penjualan ATK (Alat Tulis Kantor), dan Jasa Kursus Ketik. Jenis usaha tersebut hanya sebagian masyarakat saja yang merasa terbantu dengan adanya bantuan BUMDes dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan serta jenis usaha tersebut belum dapat memberdayakan masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Bahrul Ulum sebagai berikut:

“BUMDes Amanah belum berjalan secara optimal, karena bisa dilihat pada kenyataannya masyarakat masih minim pendapatan dan kesejahteraan. Sampai saat ini BUMDes Amanah hanya fokus untuk memberdayakan anak-anak dari tingkat SD sampai dengan SMA dalam bidang jasa kursus komputer atau ketik. Tetapi dalam hal ini, masyarakat juga dikenakan tarif atau biaya Rp. 300.000 selama 3 bulan”.⁸

Padahal masyarakat yang lain juga membutuhkan hadirnya BUMDes untuk membantu masyarakat untuk dijadikan sebagai wadah untuk menjual hasil sumber daya alam yang ada di desa seperti penjualan

⁸Bahrul Ulum, Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Islam Asshofie, Wawancara Via Whatsapp, 18 September 2019.

hasil pertanian atau padi, hasil perkebunan seperti sayuran dan buah, serta adanya simpan pinjam untuk masyarakat yang mempunyai usaha kecil sehingga dengan adanya simpan pinjam dapat mengembangkan usaha mereka. Pemberdayaan masyarakat serta pembangunan yang dilakukan secara essensial harus dibarengi dengan menggerakkan partisipasi masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui kebijaksanaan, peraturan dan kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk membuka jalan bagi kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan dan uraian masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana wadah masyarakat yaitu BUMDes dalam menjalankan fungsinya untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Sinar Betung dan bagaimana BUMDes dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang mayoritas petani. Untuk itu peneliti mengangkat judul “Fungsi BUMDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus)”.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertempat di BUMDes Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Fokus dalam penelitian ini yaitu Fungsi BUMDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Adapun sub fokus pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Masyarakat.

2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mencoba meneliti lebih dalam mengenai Fungsi BUMDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa faktor yang menyebabkan BUMDes tidak berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana implementasi kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus?

F. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan. Adapun beberapa tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui :

1. Fungsi BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.
2. BUMDes dalam melaksanakan kegiatan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.

G. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bagi Akademisi dan Masyarakat berguna untuk menambah informasi dan khazanah pemikiran khususnya bagi pengembangan ilmu politik tentang kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sinar Betung. Selain itu juga agar dapat mengevaluasi program dan meningkatkan kinerja untuk terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Sinar Betung.
2. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambahkan pengetahuan yang luas dan diharapkan mampu membantu proses pembelajaran secara akademik dalam lingkungan kampus khususnya Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian skripsi ini adalah sebuah bentuk ilmiah yang memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Menurut pendapat Mardais, bahwa metode penelitian diterjemahkan sebagai bentuk untuk dapat melakukan suatu teknis yang melibatkan pendapat secara bersama agar dapat tercapai suatu tujuan tertentu, sedangkan pada penelitian adalah suatu upaya pada bidang ilmu pengetahuan yang berguna untuk mendapatkan beberapa fakta dalam mewujudkan kebenaran secara berurutan.

Metode Penelitian merupakan cara memaparkan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan metode yang tepat dan benar diharapkan peneliti dapat mengantarkan

kepada analisis terhadap masalah-masalah yang dijadikan tema skripsi secara kritis.⁹ Agar dapat terlaksana sebuah penelitian yang sesuai dengan metode yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan beberapa metode. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta serta sifat-sifat populasi dan pada objek tertentu. Pendapat Bogdan dan Taylor, mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai susunan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis baik secara lisan dari orang-orang maupun perilaku yang diamati.¹⁰

2. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian ini menggali data yang bersumber dari Badan Usaha

⁹Sedermayanti, Syarifudin hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung : Mandar Maju, 2002), h.25.

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), h.58.

Milik Desa (BUMDes Amanah) di Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.

b. Sifat Penelitian

Penelitian pada skripsi ini bersifat Deskriptif Analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan dianalisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.¹¹ Pada sifat penelitian deskriptif analitik ini data yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata serta angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari misalnya naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo dan dokumen resmi.¹²

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh, sedangkan sumber data dalam penelitian skripsi ini di bagi menjadi dua bagian yang bersumber dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh peneliti adalah data hasil wawancara pengurus BUMDes. Sebuah informasi yang didapatkan langsung dari tempat penelitian yang diteliti

¹¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), h.22.

¹²Burhan Bunga, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2003) cet ke 2, h.39.

dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung secara lisan kepada Bapak Ustadz Puad selaku ketua BUMDes Amanah, Bapak Saipul Anwar selaku Sekretaris dan Pengajar BUMDes, Bapak Siswanto selaku Bendahara BUMDes Amanah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu suatu data yang diperoleh langsung dan yang telah tersusun dalam bentuk dokumen seperti dari buku-buku, peraturan-peraturan, demografi suatu daerah dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah pada skripsi, serta data-data BUMDES Amanah dan arsip Desa Sinar Betung tahun 2019.¹³

4. Partisipan dan Tempat Penelitian

a. Partisipan

Partisipan merupakan seseorang yang ikut serta pada penelitian skripsi ini. Partisipan terkait pada informan atau aktor yang akan di interview atau wawancara. Populasi merupakan wilayah umum yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus BUMDes dan masyarakat yang mempunyai potensi dalam mengembangkan usaha pemanfaatan sumber daya alam berjumlah 10 orang. Sampel merupakan kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik

¹³Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 57.

populasi juga dimiliki oleh sampel. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan mengambil seluruh pengurus BUMDes yang akan dijadikan informan. Informan tersebut berjumlah 3 orang yaitu terdiri dari Bapak Ustad Fuad Abdilah selaku ketua BUMDes Amanah Desa Sinar Betung, Bapak Saipul Anwar selaku sekretaris dan pengajar BUMDes Amanah, Bapak Siswanto sebagai Bendahara BUMDes Amanah Desa Sinar Betung. Kemudian Sekretaris Desa Bapak Firdaus, 2 orang aparat Desa yaitu Erik Rifandi dan Evan, Bapak Bahrul Ulum selaku tokoh masyarakat, serta 5 orang masyarakat.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Badan Usaha Milik Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.

5. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiono, metode pengumpulan data penelitian kualitatif yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Pengolahan Data. Penelitian ini menggunakan metode :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial

dan gejala-gejala psikis untuk dilakukan pencatatan. Melalui Observasi, penelitian skripsi dapat mendapatkan banyak data dengan cara mempelajari serta memahami tingkah laku secara langsung. Melalui teknik observasi, penulis ikut turun kelapangan guna mendapatkan sebuah data baik data primer maupun sekunder serta dapat melihat langsung reaksi dari informan. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung melihat langsung data-data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara nyata.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan serta tanya jawab yang dilakukan secara langsung dan sistematis berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan melalui dua pendekatan, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pada implementasinya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pengelola BUMDes Amanah Desa Sinar Betung, kepala desa, aparat desa dan masyarakat. Pada wawancara ini menggunakan teknik yang memiliki kelebihan yaitu dapat menjadikan suasana tidak kaku, sehingga pada proses pengumpulan dan tujuannya mudah dicapai. Mempertahankan atau kebebasan wawancara dapat mendekatkan maksud dan tujuan dengan efektif dan efisien yaitu seperti

mewawancarai dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang tepat dan cermat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variable dalam bentuk berupa transkrip, buku, catatan, surat, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, dan legenda. Jadi metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal tertentu, melalui catatan-catatan, baik dari media cetak maupun media elektronik. Terkait dengan dokumen yang diperoleh dari penelitian untuk memastikan dan diperkuat dengan fakta berupa buku, sejarah desa, data geografi, data demografi, struktur desa, data organisasi BUMDes, kegiatan pemberdayaan masyarakat serta data-data yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik Desa. Terkait dengan dokumen yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang supaya dapat dipastikan dan diperkuat dengan fakta-fakta tertentu seperti foto-foto pada saat mewawancarai pengurus BUMDes Amanah Desa Sinar Betung terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

6. Metode Analisa Data

Menurut Moleong, metode analisa data merupakan suatu proses untuk menggabungkan data dan mengurutkan data dalam bentuk kategori

dan satuan uraian yang dapat dikelola, dapat ditemukan temanya serta dapat merumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.¹⁴

Boghan dalam Sugiono mendefinisikan bahwa analisis data adalah suatu proses pencarian atau penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, catatan lapangan serta bahan lainnya, sehingga sangat mudah dipahami dan penemuannya bisa diinformasikan kepada orang lain.¹⁵ Berikut tahap-tahap dalam analisa data yaitu:

a. Tahap Reduksi Data

Terdapat beberapa langkah dalam tahap reduksi data sebagai berikut:

1. Peneliti mengelompokkan dan meringkas data-data yang didapat di lapangan.
2. Catatan-catatan berbagai hal yang ditemukan di lapangan seperti yang berhubungan dengan aktivitas dan proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan kelompok dan pola data. Pada tahap reduksi data ini peneliti melakukan pengkoreksian yang ketat melalui ringkasan atau uraian yang singkat. Mengelompokkan kedalam suatu pola yang luas dan sebagainya.¹⁶

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Bina Aksara, 2008), cet ke VII, H. 231.

¹⁵ *Ibid.*, h. 280.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research Jilid II*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2000), h.233

b. Tahap Penyajian Data

Setelah tahap reduksi data, selanjutnya yaitu tahap penyajian data atau mendisplay data. Pada penelitian kualitatif data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, serta bagan yang berhubungan antar kategori.

c. Tahap Verifikasi Data

Verifikasi data didalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian dilakukan. Pada awal peneliti turun ke lapangan dan selama proses penelitian berjalan, pengumpulan data, kemudian peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, relasi persamaan, hipotesis dan kemudian dimasukkan dalam bentuk kesimpulan yang masih memiliki sifat tentatif. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Hal ini dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded melalui bertambahnya data dan verifikasi secara terus menerus. Dalam hal ini dapat menggunakan teori Triangulasi Data, dimana teori ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data yang diperoleh dengan cara berbeda.

BAB II

BUMDes DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. BUMDes

1. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa atau bisa disebut juga BUMDes merupakan badan atau usaha yang didirikan atau dibentuk oleh pemerintahan desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 39 Tahun 2010. BUMDes didirikan sebagai lembaga desa yang memiliki fungsi untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat, dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau aset yang dimiliki oleh desa tersebut.¹⁷

BUMDes merupakan lembaga usaha yang dibangun desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membantu pembangunan desa. Hal ini berarti dalam pembentukan BUMDes didasarkan oleh potensi, kapasitas yang dimiliki desa serta kebutuhan desa, yang bertujuan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dalam hal ini merupakan sebuah perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak membuat model usaha yang dikuasai oleh kelompok elit atau kelompok tertentu di tingkat desa.

¹⁷Surhayanto, Hastowiyono, *Pelembagaan BUM Desa*, (Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), h.3.

BUMDes dibangun sebagai sebuah strategi kebijakan untuk membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi, dengan bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia di desa serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Berikut ciri-ciri yang membedakan BUMDes dengan lembaga usaha yang lainnya:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b. Modal usaha bersumber dari desa dan dari masyarakat melalui penyertaan modal.
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah usaha yang berasal dari budaya lokal atau budaya yang ada di desa tersebut.
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang dihasilkan akan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- f. Fasilitas diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- g. Dalam pelaksanaan operasional dikontrol dan diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD, serta anggota.¹⁸

¹⁸Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, 2015), h.4-5

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa BUMDes merupakan sebuah badan yang dibangun atau didirikan oleh pemerintah desa bersama masyarakat sesuai dengan potensi dan aset yang dimiliki desa, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan pembangunan, serta mengembangkan potensi yang dimiliki desa.

2. Tujuan dan Fungsi Pendirian BUMDes

a. Tujuan Pendirian BUMDes

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa. Berikut tujuan pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan dan mengembangkan potensi desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi penopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.
5. Membuka lapangan pekerjaan.
6. Mengoptimalkan aset desa agar dapat bermanfaat bagi desa.
7. Memperkuat kerja sama antar desa atau pihak lainnya.

BUMDes didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi desa, meningkatkan pembangunan desa, serta dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Hal ini dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah desa memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

b. Fungsi Pendirian BUMDes

Adapun fungsi pendirian BUMDes, yaitu sebagai berikut:

- 1) BUMDes berfungsi untuk meningkatkan pendapatan desa, BUMDes mengumpulkan tabungan dalam skala lokal masyarakat desa melalui pengelolaan dan bergulir serta simpan pinjam.
- 2) BUMDes berfungsi bukan untuk berorientasi pada keuntungan tetapi lebih mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- 3) BUMDes juga berfungsi sebagai jalan untuk mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi yang ada di desa tersebut.

Berdasarkan fungsi BUMDes diatas, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa, tetapi BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga sosial, dimana BUMDes harus berpihak pada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusi dalam pelayanan sosial. Selain itu, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas

kepada masyarakat desa dengan meningkatkan penghasilan, tetapi juga memberi penyerapan tenaga kerja. Banyak pemuda di desa yang memiliki potensi yang akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan, secara tidak langsung BUMDes hadir untuk mengurangi proses urbanisasi yang selama ini seakan menjadi sebuah keharusan masyarakat di desa.¹⁹

3. Landasan Hukum BUMDes

BUMDes dalam pembentukannya memiliki dasar hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) Dasar Hukum BUMDes yaitu pada UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 213, yang berbunyi:
 - 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
 - 2) BUMDes yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada undang-undang.
 - 3) BUMDes yang dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.
- b) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- d) Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 memiliki 4 Pasal yang menjelaskan mengenai BUMDes, yaitu sebagai berikut:

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Universitas Brawijaya : Pusat Kajian Dinamika Sistem Pemerintahan (PKDSP), 2007). h.7

- 1) Pasal 87 Mengenai Semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDes.
 - 2) Pasal 88 Mengenai pendirian BUMDes.
 - 3) Pasal 89 Mengenai manfaat berdirinya BUMDes.
 - 4) Pasal 90 Mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun pada Permendagri tidak disinggung mengenai BUMDes.
- f) Dalam Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 mengenai BUMDes. Pada Peraturan ini dijelaskan mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan laporan dan pertanggungjawaban pelaporan BUMDes diatur didalamnya.²⁰

4. Prinsip-prinsip BUMDes

Dalam pengelolaan BUMDes pemerintah desa dan masyarakat menggunakan prinsip-prinsip yang ada pada BUMDes. Buku panduan BUMDes yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes sangat penting untuk diuraikan, agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota, BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat. Berikut prinsip-prinsip BUMDes, yaitu:

²⁰www.keuandangdesa.com

1. Kooperatif atau kerja sama.

BUMDes beserta semua komponen yang terlibat harus mampu melakukan kerjasama yang luas, baik tingkat desa ataupun kabupaten demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

2. Partisipatif atau dukungan dan kontribusi

Semua elemen atau komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela memberikan dukungan serta kontribusi yang dapat memberikan dorongan dengan tujuan kemajuan usaha BUMDes.

3. Emansipatif atau perlakuan yang sama

Pemerintah desa, anggota ataupun masyarakat harus mendapat perlakuan yang sama tanpa membedakan golongan, agama, suku ataupun ras.

4. Transparan atau terbuka

Aktivitas yang berhubungan dengan BUMDes, yang memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan terbuka.

5. Akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan

Seluruh kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan BUMDes harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara teknis.

6. Sustainable atau dikembangkan

Kegiatan aktivitas harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat ataupun pemerintah desa dalam wadah BUMDes.²¹

Menurut Chabib Sholeh, selain azas pemberdayaan dan desentralisasi, pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus berdasarkan pada azas-azas sebagai berikut:

1. Azas kesukarelaan

Azas ini maksudnya adalah keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMDes dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan atas dasar keinginan pribadi yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki kehidupannya.

2. Azas Kesenjajaran

Azas ini memiliki maksud setiap pihak yang menjadi Stake Holder yang terlibat didalam BUMDes memiliki kedudukan yang setara, tidak dibandingkan mana yang lebih tinggi dan yang paling rendah.

3. Azas Musyawarah

Azas ini memiliki maksud yaitu semua pihak yang terlibat didalam BUMDes diberikan hak untuk mengeluarkan pendapat, gagasan, dan ide pikiran, serta saling menghargai perbedaan

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid.*, h.13

pendapat. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan dengan jalan musyawarah sampai mufakat.

4. Azas Keterbukaan

Azas ini juga memiliki maksud dimana semua yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas BUMDes harus dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, sehingga dapat saling percaya dan saling menghormati.²²

5. Pengurus dan Pengelolaan BUMDes

1. Pengurus BUMDes

Pengurus BUMDes merupakan susunan organisasi yang setiap unit-unit kerja dalam menjalankan pelaksanaan operasional pada badan usaha milik desa dengan maksud dan tujuan untuk mencapai keinginan dari pendirian BUMDes. Pengurus BUMDes dibentuk agar masyarakat desa bisa melihat pembagian tugas, job deskripsi, tanggung jawab, serta hubungan kerja dengan pengurus BUMDes. Dalam hal ini pengelola BUMDes terbagi menjadi Pembina (komisaris), pelaksana operasional, dan pengawas BUMDes. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 132 Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015.

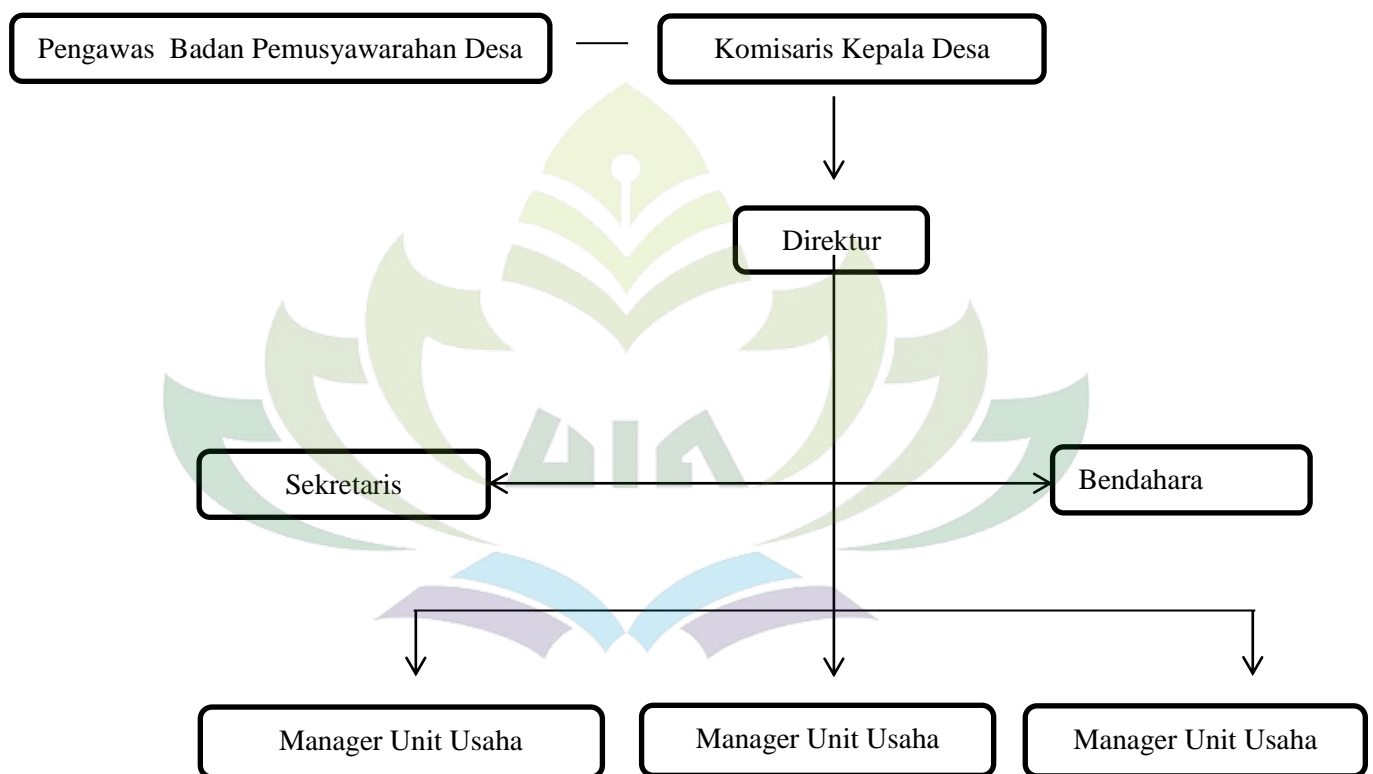
UU Desa menjelaskan bahwa, Kepala Desa menjabat sebagai Penasihat BUMDes secara *ex officio*. Pelaksana Operasional BUMDes yaitu perorangan yang direkrut dan dipilih

²²Chabib Sholeh, *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*, (Bandung : Fokusmedia, 2014), h.78.

secara terbuka dalam musyawarah desa. Kepala Desa memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana operasional melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Berikut struktur pengurus BUMDes menurut UU Desa.

BAGAN 1.

STRUKTUR PENGURUS BUMDes



Berikut tugas dan peran struktur pengurus BUMDes dari tingkat yang paling tertinggi hingga terendah:

- 1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa

- a) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa berperan sebagai fasilitator atau yang memberikan fasilitas terhadap upaya BUMDes dalam mencapai tujuan.
- b) Memberi kritik dan saran serta informasi kepada BUMDes dengan tujuan untuk meningkatkan kinerjanya.

2) Dewan Komisaris

- a) Dewan Komisaris memiliki tugas sebagai pengawas, pengkoordinir, dan sebagai penasihat operasionalisasi BUMDes.
- b) Pembuat keputusan penting ketika BUMDes mengalami suatu masalah.
- c) Dewan Komisaris bertugas sebagai pengamat yang mencari peluang baru yang dimanfaatkan pada BUMDes.
- d) Dewan Komisaris dapat bertindak sebagai negosiator yang melakukan rundingan dengan pihak ketiga.
- e) Dewan Komisaris bertugas memberikan tugas kepada manager-manager unit dan penyusun rencana usaha BUMDes serta penyusun standar kinerja BUMDes.

3) Sekretaris

- a) Sekretaris bertugas membantu manager unit dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab kepada manager unit.

- b) Melakukan pencatatan aktivitas penting yang harus didokumentasikan.
- c) Sekretaris juga bertugas untuk menyusun laporan kinerja unit usaha dan menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

4) Bendahara

- a) Bendahara bertugas sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan oleh unit usaha BUMDes dan sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi unit usaha.
- b) Sebagai pencatat semua pengeluaran dan pemasukan BUMDes.
- c) Bendahara juga memiliki tugas yang sama dengan Sekretaris yaitu bertanggungjawab kepada unit manager.

5) Manager Unit Usaha

- a) Manager Unit Usaha bertugas sebagai pelaksana operasional unit kerja dibawah wewenangnya dan sebagai pengendali unit kerja.
- b) Manager Unit Usaha bertindak sebagai pembuat keputusan unit kerja dan sebagai bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

- c) Manager Unit Usaha juga bertindak sebagai penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada BUMDes.
- d) Manager memiliki tugas sebagai pengelola potensi yang ada di dalam BUMDes.
- e) Manager Unit Usaha juga bertindak sebagai tokoh dalam melakukan tugas seremonial.

2. Pengelolaan BUMDes

Permendesa No. 4 Tahun 2015 menjelaskan mengenai pengelolaan BUMDes, didalam peraturan tersebut mengatur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan BUMDes dalam pelaksanaannya BUMDes disertai peran dan fungsi dari masing-masing perangkat BUMDes. Permendesa No. 4 Tahun 2015 berlaku umum, dikatakan demikian tetap saja dalam pelaksanaan di daerah harus ada penyesuaian yang kemudian diatur oleh Peraturan Bupati sesuai dengan potensi, keadaan alam, lingkungan, dan budaya yang ada diwilayah tersebut.

BUMDes dikelola secara profesional dan mandiri sehingga dibutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan potensi untuk mengelolanya. Pengurus BUMDes yang direkrut harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes. Latar belakang

pendidikan bagi pemegang jabatan sangat penting untuk menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan pekerjaan.

Dalam pengelolaan BUMDes ada hal yang sangat penting yaitu dalam proses pengelolaan BUMDes sangat dibutuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Hal ini maksudnya adalah dalam pengelolaan harus terbuka dan transparan sehingga mekanisme check and balance dapat berjalan, baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat.²³

6. Klasifikasi Jenis Usaha

Adapun jenis usaha yang sesuai dengan Permendesa No. 4 Tahun 2014 Pasal 19, Bab III, Bagian keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes, yaitu sebagai berikut:

1. Bisnis Sosial (Social Bussines)

Bisnis Sosial merupakan bisnis yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh finansial, seperti Air Minum Desa, Usaha Listrik Desa, Lumbung Pangan, Sumber Daya Lokal dan Teknologi tepat guna lainnya.

2. Bisnis Penyewaan (Renting)

Bisnis Penyewaan merupakan bisnis yang memberikan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa. Kebutuhan masyarakat yaitu

²³Joko Purnomo, *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*, (Yogyakarta : Infest Yogyakarta, 2016), h.35.

seperti Alat Transportasi, Perkakas Pesta, Gedung Pertemuan, Rumah Toko, Tanah Milik BUMDes, dan Barang sewaan lainnya.

3. Usaha Perantara (Brokering)

Usaha Perantara ini memberikan jasa pelayanan kepada warga desa, misalnya seperti Jasa Pembayaran Listrik, Pasar desa untuk memasarkan produk masyarakat dan jasa pelayanan lainnya.

4. Bisnis Bersama (Holding)

Usaha bersama merupakan unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan yang dapat berdiri sendiri dan diatur atau dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama. Seperti contoh misalnya:

- a) Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya lebih ekspansif.
- b) Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat.
- c) Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasi jenis usaha lokal lainnya.

5. Bisnis Keuangan (Financial Business)

Bisnis keuangan merupakan bisnis yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Misalnya akses kredit simpan pinjam yang mudah diakses masyarakat desa.

6. Bisnis Produksi atau Perdagangan (Trading)

Bisnis Produksi merupakan bisnis yang memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala yang lebih luas. Seperti contoh Pabrik es, Pabrik asap cair, Hasil pertanian, Sarana produksi pertanian, Sumur Bekas Tambang, dan Kegiatan bisnis produktif lainnya.²⁴

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah kemampuan individu yang berhubungan dengan masyarakat dengan tujuan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga memiliki tujuan untuk menemukan alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (12), didalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

²⁴Permendesa No.4 Tahun 2014 Pasal 19-24, BAB III, Bagian 4 *Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes*.

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

Pemberdayaan merupakan sebuah proses, tetapi proses tersebut dilihat dari indikator-indikator yang menyertai proses pemberdayaan dengan tujuan menuju keberhasilan. Dalam mengetahui pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat secara operasional, sehingga banyak yang perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang atau sekumpulan masyarakat berdaya atau tidak. Dengan tindakan ini kita dapat melihat ketika pemerintah memiliki program pemberdayaan sosial yang ditujukan terhadap masyarakat, upaya yang dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan. Misalnya program yang ditujukan pada keluarga miskin.²⁵

Menurut Suharto, pemberdayaan diartikan sebagai sebuah proses dan tujuan, berikut penjelasan pemberdayaan tersebut:

- a. Pemberdayaan sebagai proses merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan.
- b. Pemberdayaan sebagai tujuan merupakan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang

²⁵Ahmad Suhaimi, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembangunan Partisipatif Wilayah Pinggiran dan Desa*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), h.46.

berdaya, masyarakat yang memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁶

Menurut Fahrudin, pemberdayaan masyarakat merupakan kemampuan untuk memandirikan masyarakat yang melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Enabling, enabling merupakan suasana atau iklim yang dapat memungkinkan masyarakat dapat berkembang.
- b. Empowering, merupakan peningkatan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.
- c. Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan dengan masyarakat yang menjadi subjek pengembangan.²⁷

Dalam implementasinya, pemberdayaan memiliki arti dorongan dan motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Hal ini merupakan sebuah upaya terhadap sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju kebiasaan dan perilaku yang baru yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

²⁶Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), h.60.

²⁷Adi Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas*, (Bandung : Humaniora, 2012), h.96.

2. Model Pemberdayaan Masyarakat

a. Model Fisik (physical capital)

Model fisik merupakan fasilitas atau aset yang digunakan sebagai alat dan pendukung utama terselenggaranya suatu proses usaha atau aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan seperti gedung, alat-alat, mesin, dan lainnya.

b. Model Manusia (human capital)

Model manusia merupakan model yang melihat aset yang berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan aktivitas tertentu.

c. Model Sosial (Social Capital)

Model sosial merupakan model yang didalamnya terdapat norma atau nilai yang telah dipahami bersama oleh masyarakat yang bertujuan dapat memperkuat jaringan sosial atau kerja, dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk menciptakan nilai.

d. Kemampuan Pelaku Pemberdayaan

Kemampuan pelaku pemberdayaan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh pelaku pemberdayaan yang diharapkan memiliki tujuan yaitu dapat memberdayakan masyarakat.

e. Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan merupakan suatu proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok baik formal maupun non formal untuk melakukan kajian masalah,

merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap program yang sudah direncanakan.

f. **Keberdayaan Masyarakat**

Keberdayaan masyarakat merupakan dimilikinya daya, kekuatan atau kemampuan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta dapat menentukan alternatif pemecahan masalah secara mandiri.²⁸

3. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto, terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

a. **Perbaikan Kelembagaan (better institution)**

Dengan adanya perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan serta diharapkan dapat memperbaiki pengembangan jejaring usaha.

b. **Perbaikan Usaha (better business)**

Perbaikan usaha seperti perbaikan pendidikan, perbaikan akses bisnis, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang dilakukan.

c. **Perbaikan Pendapatan (better income)**

Dilakukannya perbaikan bisnis, diharapkan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh dari pendapatan keluarga maupun dari masyarakat.

²⁸ Ahmad Suhaimi, *op.cit.*, h.50.

d. Perbaikan Lingkungan

Dilakukannya perbaikan pendapatan, diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial, karena biasanya kerusakan lingkungan terjadi karena adanya kemiskinan dan pendapatan masyarakat yang terbatas.

e. Perbaikan Kehidupan

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

f. Perbaikan Masyarakat

Perbaikan masyarakat dilakukan dengan tujuan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik.²⁹

4. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Pranarka dan Vidhyandika pada proses pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, yaitu:

- a. Proses pemberdayaan yang pertama merupakan proses yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan serta kemampuan kepada masyarakat dengan tujuan agar individu lebih berdaya. Kecenderungan ini disebut sebagai kecenderungan primer.
- b. Proses pemberdayaan yg kedua ini merupakan kecenderungan yang menstimulasi, mendorong serta memotivasi individu agar

²⁹Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.202.

mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Kecenderungan ini disebut sebagai kecenderungan sekunder.

Masyarakat yang berdaya dapat dilihat melalui ciri-ciri masyarakat yang berdaya menurut Sumardjo:

- a. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan atau mampu mengantisipasi kondisi perubahan ke depan.
- b. Masyarakat yang berdaya merupakan masyarakat yang dapat mengarahkan dirinya sendiri.
- c. Memiliki kekuatan untuk berunding.
- d. Masyarakat yang berdaya memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan diri
- e. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya.

Menurut Slamet masyarakat berdaya merupakan masyarakat yang tahu, mengerti, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, memanfaatkan peluang, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari, menangkap, menyaring informasi dan mampu bertindak sesuai dengan kondisi dan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab.³⁰

³⁰Ahmad Suhaimi, *op.cit.*, h.55.

5. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Najiati dkk, terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk menjalankan proses pemberdayaan masyarakat. Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, yaitu:

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan merupakan prinsip yang paling utama dalam menjalankan proses pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

b. Partisipasi

Pada proses pemberdayaan, masyarakat harus memiliki sifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Masyarakat harus memiliki rasa suka rela untuk ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan atau kemandirian merupakan prinsip yang menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Pada prinsip keswadayaan konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai subjek masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, melainkan masyarakat yang memiliki kemampuan sedikit. Dalam hal ini bantuan yang diberikan oleh orang lain itu hanya sebagai penunjang dari prinsip keswadayaan,

sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan keswadaanyaannya.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan masyarakat perlu dirancang atau disusun untuk program keberlanjutan, sekalipun yang pada awalnya ada peran pendampingan lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Secara perlahan masyarakat tidak perlu lagi adanya pendampingan karena masyarakat sudah mampu mengelola usahanya atau kegiatannya sendiri.³¹

6. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan masyarakat terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan perubahan sosial, yaitu tradisional, direct action, dan transformasi. Berikut penjelasan dari masing-masing strategi pemberdayaan masyarakat:

- a. Strategi Tradisional, pada strategi ini menyarankan agar masyarakat dapat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Strategi tradisional ini tidak memaksakan masyarakat untuk memilih kepentingan, semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka dan tidak ada pihak lain yang menekan mereka.
- b. Strategi direct action, pada strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh pihak lain atau pihak yang terlibat,

³¹Sri Najiati, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor : Wetlands International, 2005), h.54.

dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Strategi ini ada pihak yang berpengaruh dalam membuat keputusan.

- c. Strategi transformatif, strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan masa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum mengidentifikasi kepentingan diri sendiri.

Strategi pemberdayaan pada dasarnya merupakan gerakan diri, oleh dan untuk masyarakat. Menurut Sugyono, gerakan masyarakat berbeda dengan membuat model. Suatu model cenderung harus membuat dulu sebuah model percontohan ideal, selanjutnya setelah diuji baru di sebarluaskan. Dalam hal ini berbeda dengan gerakan masyarakat, ditempuh dengan cara melalui jangkauan kepada masyarakat seluas-luasnya. Benih pemberdayaan ditebar kepada berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat akhirnya akan beradaptasi, melakukan penyempurnaan dan pembenahan yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kebutuhan serta cara atau pendekatan kepada masyarakat lokal.³²

7. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tahap-tahap atau langkah-langkah yang dilakukan, berikut tahap-tahap tersebut:

- a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini terdapat dua tahapan yang harus dilakukan, yaitu tahap penyimpanan petugas, maksudnya adalah tenaga

³²Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora, 2006), h.65.

pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan tahap kedua yaitu tahap penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

b. Tahap Pengkajian (Assessment)

Pada tahap ini merupakan sebuah proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki partner.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program dan Kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif. Dalam pelaksanaannya mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya. Tahap ini dalam konteksnya diharapkan masyarakat dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

d. Tahap Pemfomalisasi Rencanaaksi.

Pada tahap ini agen perubahan membantu kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

e. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan, maka peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga

keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Menjalani kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik, meleset dari perkiraan yang terjadi di lapangan tersebut.

f. Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan sebagai suatu proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat. Hal tersebut dilakukan diharapkan dapat membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dalam waktu jangka pendek, sedangkan dalam waktu jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

g. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran.³³

C. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga sosial yang direncanakan secara profesional demi menciptakan individu atau masyarakat yang terpenuhi kebutuhan-

³³Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 1987), h.63.

kebutuhan dasarnya dan selanjutnya masyarakat atau individu dapat mengatasi masalah sosialnya sendiri dengan bantuan seorang pekerja sosial. Pekerjaan Sosial merupakan profesi pertolongan yang menekankan pada keberfungsian sosial manusia. Menurut Zastrow dalam Suharto Pekerjaan sosial adalah Aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Profesi pekerjaan sosial sesuai dengan pengertian di atas adalah bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui interaksi agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan.³⁴

2. Konsep Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya

³⁴Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2018), h.8.

secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

- a. Rasa aman (security)
- b. Kesejahteraan (welfare)
- c. Kebebasan (freedom)
- d. Jati diri (Identity)

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah :

- a. Tingkat pendapatan keluarga
- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan
- c. Tingkat pendidikan keluarga
- d. Tingkat kesehatan keluarga
- e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Menurut Drewnoski dalam Bintarto, melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek, yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (somatic status), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya.
- b. Dengan melihat pada tingkat mentalnya, (mental/educational status) seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.
- c. Dengan melihat pada integrasi dan kedudukan social (social status).

Todaro mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.³⁵

³⁵Isbandi Rukminto, *Ibid.*, h. 13.

3. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan Kesejahteraan Sosial Menurut fahrudin, dalam buku Pengantar Kesejahteraan Sosial, menerangkan bahwa tujuan dari Kesejahteraan Sosial adalah: 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. 2) Untuk mencapai peyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan adanya sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Selain itu, Schneiderman mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem.

4. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin dalam buku pengantar Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindari terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

- a. Fungsi pencegahan (Preventive) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya

terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

b. Fungsi Penyembuhan (Curative)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitas).

c. Fungsi pengembangan (Development)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi penunjang (Supportive)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.³⁶

5. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator kesejahteraan, yaitu merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut

³⁶Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), h.12.

beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut Beckermen, yaitu:

- a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua Negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan Nasional.
- b. Kelompok yang berusaha untuk menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat setiap Negara.
- c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap warga Negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi minyak.

Indikator kesejahteraan masyarakat dapat disimpulkan meliputi:

- a. Pendapatan

Pendapatan merupakan sebuah penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Indikator pendapatan terbagi menjadi 3 item yaitu:

 - 1) Tinggi (Rp > 5.000.000)
 - 2) Sedang (Rp 1.000.000-5000.000)
 - 3) Rendah (< Rp 1.000.000)

b. Konsumsi Penghasilan

Salah satu indikator kesejahteraan yaitu pola konsumsi rumah tangga atau keluarga. Dewasa ini berkembang banyak penelitian yang menjelaskan bahwa besar kecilnya porsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Semakin tinggi tingkat penghasilan maka semakin kecil tingkat proporsi pengeluaran untuk makanan, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian dapat diartikan bahwa rumah tangga atau keluarga akan semakin sejahtera apabila persentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan <80% dari pendapatan.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telat menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa.

d. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar Negara adalah Human Development Index (HDI) atau index pembangunan manusia (IPM). Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi pangan, sandang, dan papan.³⁷

D. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan judul skripsi ini, ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis terkait dengan referensi mengenai Fungsi BUMDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan menjadi acuan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat” ditulis oleh Lia Kholilatul Arifah mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, dimana pada skripsi ini membahas mengenai pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik desa dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi alam yang ada di daerah

³⁷Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Index Pembangunan Kesehatan Manusia, h.13.

tersebut, dengan melalui tahap-tahap penyadaran, evaluasi, pelatihan dan pendampingan.³⁸

2. Penelitian dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung” ditulis oleh Mujiyono mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah mengenai wujud keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha yang dilakukan BUMDes Sanggrahan Kecamatan Kranggan. Dalam pelaksanaannya BUMDes tersebut secara langsung melibatkan masyarakat di semua tahap pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi.³⁹
3. Penelitian dengan judul “Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa Sukarejo Gandusari Trenggalek” ditulis oleh Devy Novitasari, mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2019. Dalam skripsi ini membahas mengenai pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui program BUMDes, yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan bertujuan untuk menjadikan masyarakat

³⁸Lia Kholifatul Arifah, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat”. (Skripsi Sarjana Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2019).

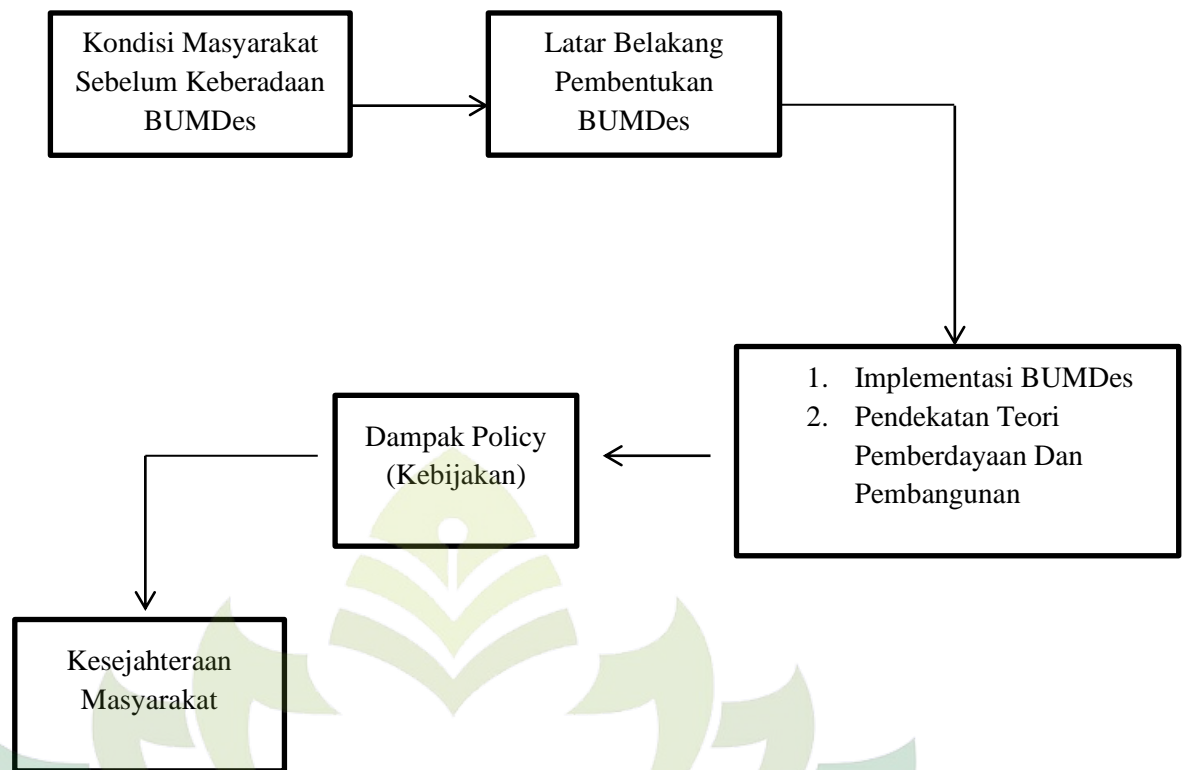
³⁹Mujiyono, “Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung”. (Skripsi Sarjana Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2017).

lebih mandiri. Dalam skripsi ini juga menjelaskan peran BUMDes dalam mengembangkan usaha dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat Desa Karangsono, serta menjelaskan dampak BUMDes tersebut dilihat dari perspektif ekonomi Islam terhadap BUMDES dalam mengembangkan usaha dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat tersebut.⁴⁰

Pada skripsi yang penulis susun tentunya akan berbeda dengan tinjauan pustaka di atas yang telah membahas mengenai Fungsi BUMDes terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan pada skripsi ini penulis lebih melihat mengenai Fungsi BUMDes dalam memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan partisipatif masyarakat. Skripsi ini juga meneliti mengenai implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat dan pembangunan desa. Sehingga tidak akan ada kesamaan dalam isi proposal ini nantinya dengan skripsi yang telah ada dan terhindar dari plagiat.

⁴⁰Devy Novitasari, "Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa Sukorejo Gandusari Trenggalek". (Skripsi Sarjana Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulung Agung, Jawa Timur, 2019).

E. Kerangka Berfikir



Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hakikatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan dan pemberdayaan diperdesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan dan mengoptimalkan Sumber Daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya adalah untuk memberikan peluang bagi kemampuan daerah dan desa.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa. Cara kerja BUMDes yaitu dengan jalan

menampung kegiatan-kegiatan masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Desa Sinar Betung, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, dimana desa ini merupakan salah satu di Kecamatan Talang Padang yang sudah memiliki BUMDes dan telah berjalan mulai tahun 2017. Desa Sinar Betung merupakan desa yang diberikan peluang oleh pemerintah untuk berkembang menjadikan masyarakat desa yang kreatif, inovatif, dan produktif. Dalam hal ini Desa Sinar Betung berpedoman pada Peraturan Desa No. 4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menjadi acuan dalam pembentukan BUMDes yang ada di Desa Sinar Betung.

Sebelum adanya BUMDes di Desa Sinar Betung ini dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti melengkapi administrasi, Fotocopy dan kebutuhan lainnya harus menempuh jarak yang lumayan jauh dan harus pergi ke Kecamatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat sebelum adanya BUMDes belum memiliki kemampuan dalam pengoperasian komputer khususnya siswa atau siswi yang sedang dalam proses belajar.

Desa Sinar Betung ini termasuk desa dengan potensi yang sangat baik, tetapi kurang stabil karena tidak ada perkembangannya yang terlihat signifikan dari usaha atau lembaga yang didirikan. Selain itu kondisi masyarakat yang kurang adanya keinginan melakukan perubahan sehingga menjadi pemicu utama ketidakstabilan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan sebelum adanya BUMDes di Desa Sinar Betung pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan secara optimal, karena

melihat masyarakat di Desa tersebut tidak seluruh masyarakat yang berpartisipasi dalam mengelola potensi desa dan masyarakat kurang adanya keinginan untuk melakukan perubahan, meningkatkan kemampuan atau skill serta meningkatkan atau menggunakan potensi yang ada di Desa tersebut.

Pembentukan BUMDes di Desa Sinar Betung memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM agar masyarakat memiliki kemampuan atau skill dalam pengoperasian komputer, sehingga tidak tertinggal dengan desa atau daerah lain. Selain itu tujuan lain dari pembentukan BUMDes adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, sehingga menjadikan masyarakat lebih produktif dan dapat meningkatkan pendapatan. BUMDes dibentuk dalam rangka sebagai alat pengoptimal pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa tersebut.

Kehadiran BUMDes Amanah telah dirasakan oleh masyarakat, bagi masyarakat kehadiran tersebut sangat membantu masyarakat Desa. BUMDes di Desa Sinar Betung telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat desa, tidak hanya untuk fotocopy saja, tetapi kebutuhan yang lain yang harus membeli di desa lain. Misalnya penyediaan ATK, bisa membeli token listrik dan pulsa. Unit usaha BUMDes Amanah yang lain yaitu berupa Kursus Komputer yang telah memudahkan kelancaran masyarakat khususnya siswa dan siswi. Dalam hal ini BUMDes telah memberikan kemudahan kepada pelajar untuk belajar dan memahami pengoperasian komputer yang bertujuan untuk memudahkan pelajar dan meningkatkan kemampuan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Adi, Fahrudin. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung : Refika Aditama.

-----, 2012. Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas, Bandung : Humaniora.

Adisasmita, Rahardjo. 2013. Pembangunan Perdesaan. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Arikunto, Suharsimi. 2008. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Bina Aksara, Cet. Ke- 7.

Bunga, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, Cet. Ke- 2.

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Universitas Brawijaya : Pusat Kajian Dinamika Sistem Pemerintahan (PKDSP).

Hastowiyono, Surhayanto. 2014. Pelembagaan BUM Desa. Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Hikmat, Harry. 2006. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Humaniora.

Mardikanto, Totok. 2014. CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi). Bandung : Alfabeta.

Moleong, Lexy J.. 2005. Metodologi Kualitatif Bidang Filsafat. Yogyakarta : Paradigma.

- Najiati, Sri, dkk. 2005. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Bogor : Wetlands International.
- Pabundu Tika, Muhammad. 2006. Metodologi Riset Bisnis. Jakarta : Bumi Aksara.
- Purnomo, Joko. 2016. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Yogyakarta : Infest Yogyakarta.
- Rukminto Adi, Isbandi. 2018. Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Sholeh, Chabib. 2014. Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan. Bandung : Fokusmedia.
- Soekanto, Soerjono. 1987. Sosial Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Press.
- Suhaimi, Ahmad. 2016. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembangunan Partisipatif Wilayah Pinggiran dan Desa. Yogyakarta : Deepublish.
- Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : Refika Aditama, Cetakan ke- lima.
- Surya Putra, Anom. 2015. Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa, Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
- Suryabrata, Sumadi. 2009. Metodologi Penelitian. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Syarifudin hidayat, Sedermayanti. 2002. Metodologi Penelitian Bandung : Mandar Maju.

Wijaya, David. 2018. *BUM DES*. Yogyakarta : Grava Media, Cetakan ke-satu.

Sumber Jurnal

Noor, Munawir. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmiah, Vol.1, No.2.

Nugraha,Adiatma, Kismaranti. 2019. Evaluasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Rejo Mulyo Desa Gogik Kecamatan Unggaran Barat Kabupaten Semarang. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol.1, No. 1 (diakses 19 September 2019 Pukul 02.28 WIB).

Sumber On- Line

Kholilatul Arifah, Lia. 2019. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa,(BUMDes) Di Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat”. (On- Line), tersedia di: <http://repository.radenintan.ac.id> (25 November 2019 Pukul 13.23 WIB).

Mujiyono. 2012. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung”. (On- Line), tersedia di: <http://lib.unnes.ac.id> (20 November 2019 Pukul 16.35 WIB).

Novitasari, Devy. 2019. “Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa Sukarejo Gandusari Trenggalek”. (On- Line), tersedia di: <http://repo.iaintulungagung.ac.id> (20 November 2019 Pukul 00.43 WIB).

www.folderdesa.com. Diakses pada 4 November 2019 Pukul 08.13 WIB

www.keuangandes.com. Diakses pada 4 November 2019 Pukul 08.25 WIB.

Sumber Wawancara

Ayud. Wawancara dengan masyarakat Desa Sinar Betung, wawancara tatap muka, 12 Desember 2019.

Bahrul Ulum. Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Islam Asshofie. Wawancara via whatsapp. 18 September 2019.

Erik Rifandi. Wawancara dengan KASI Pemerintahan Desa Sinar Betung. Wawancara tatap muka, 12 Desember 2019.

Evan. Wawancara dengan Aparatur Desa. Wawancara Tatap Muka. 12 Desember 2019.

Firdaus. Wawancara dengan Sekretaris Desa Sinar Betung. Wawancara tatap muka, 12 Desember 2019.

Iyyah. Wawancara dengan Masyarakat Desa Sinar Betung. Wawancara tatap muka, 12 Desember 2019.

Kasniawati. Wawancara dengan masyarakat Desa Sinar Betung. Wawancara tatap muka, 12 Desember 2019

Saipul Anwar. Wawancara dengan Sekretaris BUMDes. Wawancara via whatsapp, (28 Oktober 2019).

Samanih. Wawancara dengan masyarakat Desa Sinar Betung. Wawancara tatap muka, 12 Desember 2019.

Siswanto. Wawancara dengan Bendahara BUMDes Desa Sinar Betung. Wawancara tatap muka, 12 Desember 2019.

Ustad Fuad Abdilah. Wawancara dengan Ketua BUMDes Amanah. Wawancara tatap muka, 12 Desember 2019.

Yatimah. Wawancara dengan masyarakat Desa Sinar Betung. Wawancara tatap muka, 12 Desember 2019.

Sumber Peraturan

Permendesa No.4 Tahun 2014 Pasal 19-24, BAB III, Bagian 4 Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 78 ayat (1).